

# **SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DI KPPN**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap pemeriksaan laporan pertanggungjawaban di KPPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem informasi akuntansi sudah berjalan baik dan terkomputerisasi, walaupun masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban serta banyaknya berkas yang masih ada walaupun sudah menggunakan komputerisasi dan pengendalian internal telah berjalan dengan baik dimana terdapat bagian pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan, walaupun masih adanya rangkap jabatan karena sumber daya manusia yang masih kurang.

**Kata kunci** : Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban

## **Abstract**

*This study aims to determine the application of accounting information systems and internal control of the accountability report examination at KPPN. The method used in this research is qualitative with interpretive paradigm and ethnomethodical approach. The results of this study are that the application of accounting information systems has been running well and computerized, although there are still delays in the delivery of accountability reports and the number of files that still exists even though it has used computerization and internal control has been running well where there is a monitoring section in the activities carried out, although there are still double positions because of the lack of human resources.*

**Keywords:** *Accounting Information Systems, Internal Control and Accountability Reports*

## **PENDAHULUAN**

Anggaran yang sudah disusun dan digunakan oleh kementerian untuk kegiatan operasionalnya perlu dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pada hakekatnya APBN tersebut merupakan mandat yang

diberikan oleh DPR RI kepada Pemerintah untuk melakukan penerimaan pendapatan negara dan menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan ke pemerintahannya mencapai tujuan-tujuan tertentu dan dalam batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun anggaran tertentu. Pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR (pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan dalam setiap Undang-Undang APBN).

Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian digunakan oleh pemerintah sebagai langkah pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi di dalam penggunaan APBN untuk kebutuhan masyarakat, dimana saat ini masih banyak lembaga negara yang belum menjalankan prinsip transparansi di pemerintah. Laporan pertanggungjawaban di kementerian saat ini masih mengalami hal yang rumit, sehingga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban membutuhkan waktu yang lama serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang masih telat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan instansi vertical direktorat jenderal perbendaharaan negara bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta. KPPN bertugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan yang berorientasi pada visi dan misi direktorat jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia dan bertugas untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian sebagai bukti pertanggungjawaban kementerian negara dalam menggunakan anggaran yang dikirimkan kepada kementerian melalui sistem. Namun pengiriman laporan pertanggungjawaban pengeluaran kementerian, walaupun sudah melakukan pengiriman melalui website, tetapi kementerian masih harus tetap datang untuk membawa laporan pertanggungjawaban untuk dicek lagi. Selain itu, sistem penginputan data laporan pertanggungjawaban yang masih sering mengalami kendala, dimana laporan pertanggungjawaban yang diinput belum diterima serta pengendalian internal dalam KPPN masih sedikit lemah. Hal itu dapat terlihat dari masih adanya rangkap jabatan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam KPPN, sehingga karyawan ada yang merangkap jabatan untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang lainnya. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Huda, Ekawati, dan Pratiwi, (2017), Maulana, (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian internal dimana apabila sistem informasi akuntansi berjalan dengan baik, maka pengendalian internal akan berjalan dengan baik. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Efendi, Supheni, dan Astutik, (2013) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi pada kinerja karyawan. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem

informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian internal dan secara simultan juga demikian. Kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap sistem informasi akuntansi dalam mempengaruhi keefektifan pengendalian internal.

Penelitian internasional yang dilakukan oleh Susanto, (2016), Fakeeh, (2015), Hertati dan Zarkasyi (2015), Sajady, Dastgir, dan Hashem Nejad, (2008), Wardani, (2017), Azizah, (2017). Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah. Sementara penelitian tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh Badara, (2013), Saidin, (2013), Susanto, (2016) yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mencegah dan meminimalkan kesalahan dan penipuan dalam menerapkan sistem informasi untuk menghasilkan informasi kontrol internal perlu diterapkan di dalam sistem. Hasil penelitian mereka sama sama menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara pengendalian internal dengan sistem informasi akuntansi.

Fokus penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam sistem informasi akuntansi dimana kementerian tetap harus datang ke KPPN walaupun sudah memasukkan ke sistem. Selain itu juga, adanya rangkap jabatan dan kurang adanya tempat chatting untuk memberi tahu kepada kementerian bila terjadi kesalahan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di KPPN

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Informasi Akuntansi secara garis besar dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang menggambarkan pemrosesan data-data dari aktivitas bisnis pengolahan data keuangan perusahaan dengan menggunakan sistem informasi komputer yang terintegrasi secara harmonis. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem informasi akuntansi, terdiri dari 3 komponen utama yaitu input, proses, dan output. Fungsi ini menunjukkan bahwa sistem sebagai proses tidak bisa berdiri sendiri, harus ada input, proses, dan output dalam kegiatannya. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem, input bervariasi bisa berupa energi, manusia, data, modal dan pemicu bagi sistem untuk melakukan proses. Sementara proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Proses mungkin berupa perakitan yang menghasilkan satu macam output dari berbagai macam input yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Output adalah hasil dari suatu proses yang

merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Output dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Output yang langsung diberikan
- b. Output suatu sistem yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama
- c. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem yang lain atau oleh sistem yang bersangkutan, tapi menjadi tidak berguna kalau dibuang ke lingkungan

### **Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi**

Tujuan utama Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi (informasi akuntansi) yang berkualitas. Peningkatan kualitas informasi akan membawa konsekuensi meningkatkan biaya/sumber daya yang digunakan. Dalam meningkatkan SIA juga membutuhkan tambahan biaya investasi. Mekanisme uji silang ini bagian dari struktur pengendalian internal dalam meningkatkan keandalan data dan informasi. Sistem informasi akuntansi memiliki berbagai macam manfaat, diantaranya yaitu :

- a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien
- b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan efisiensi
- c. Meningkatkan kemampuan dalam hal pengambilan keputusan
- d. Menambah efisiensi kerja dalam bagian keuangan

### **Pengertian Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. LPJ merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Adapun fungsi dari LPJ adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Contohnya misalnya, anda ingin melakukan suatu kegiatan. Maka anda akan mengusulkan proposal. Setelah melaksanakan kegiatan. Anda dimintai LPJ atau dari kegiatan yang anda lakukan sesuai anggaran yang telah anda usulkan. Biasanya Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya mencakup:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan
- b. Laporan penggunaan dana.

### **SPJ dan Buku Besar Kas**

Bastian, (2006, hlm.367), menjelaskan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan dokumen, surat pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:

- a. Buku Kas Umum (BKU)- buku besar kas
- b. Buku besar pembantu pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara
- d. Register penutupan kas

Buku besar kas tersebut diatas ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

- a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
- b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban
- c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
- d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
- e. Register penutupan kas

Dalam hal surat pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan surat pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran.

Dalam melakukan verifikasi atas surat pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya

- 1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
- 2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya
- 3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
  - a) Buku besar kas
  - b) Bukubesar pajak PPN/PPH
  - c) Buku besar panjar
- 4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran yang sah
- 5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- 6) Surat pertanggungjawaban pengeluaran mencakup
  - a) Buku Kas Umum
  - b) Buku pajak PPN/PPH
  - c) Bukti pengeluaran yang sah
- 7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas surat pertanggungjawaban pengeluaran
- 8) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan
- 9) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan
- 10) Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan disertai register penutupan kas

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan dengan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer.

### **Dokumen Laporan Pertanggungjawaban**

Bastian, (2006, hlm.370), menjelaskan bahwa dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ Pengeluaran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Liwa. Pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN
- c. Rekening Koran/ Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran /Penerimaan / Lainnya Satuan Kerja untuk setiap akhir semester.

### **Pengertian Pengendalian Internal**

Bastian, (2006, hlm.450), menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur, organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

### **Tujuan Pengendalian Internal**

Bastian, (2006, hlm.450), menjelaskan tujuan sistem pengendalian internal yang efektif dalam buku dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga kekayaan organisasi
- b. Untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Untuk mendorong efisiensi
- d. Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dalam buku Bastian, (2006, hlm.450), dapat dibagi menjadi dua, yaitu;

- a. Pengendalian internal akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- b. Pengendalian internal administrative meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan pimpinan.

Sementara, tujuan pengendalian internal menurut (A. Arens, Randal, & Beasley, 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan Laporan Keuangan  
Keandalan data pada laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu, akurat dan lengkap, data debitur terkumpul sesuai dengan

prosedur sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat membantu pengambilan keputusan bagi pihak manajemen.

b. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan digunakan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan yang tercantum dalam perencanaan kredit guna bhakti perusahaan baik dalam mengelola sumber daya dan fasilitas sesuai kemampuan perusahaan sehingga tercapai efisiensi di dalam kredit guna bhakti. Terdapat standar kinerja dalam kegiatan perusahaan agar target pendapatan dari aktivitas kredit guna bhakti dapat digunakan sebagai alat pengendalian agar lebih efektif.

c. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Perusahaan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku (laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK) dan pegawai perusahaan harus patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi.

### **Komponen Pengendalian Internal**

Arens, (2012, hlm.211), menjelaskan pengendalian internal (internal control) menurut COSO (Commitee of Sponsoring Organization) dalam terdiri atas 5 komponen, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian Inti dari setiap perusahaan adalah faktor manusia yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi; filosofi dan gaya manajemen; cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya
- b. Penilaian Risiko Perusahaan harus menyadari dan menghadapi risiko. Perusahaan harus menetapkan tujuannya dipadukan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi secara terkoordinasi.
- c. Aktivitas Pengendalian Kebijakan pengendalian dan prosedur harus ditetapkan dan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi risiko, yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan, dilaksanakan secara efektif.
- d. Informasi dan Komunikasi Merupakan sistem informasi dan komunikasi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada para pegawai, dalam melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya.
- e. Monitoring/pemantauan. Seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian sistem yang ada dapat secara dinamis berubah sesuai keadaan yang dihadapi.



## **Unsur Pengendalian Internal**

Unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian internal menurut Bastian, (2006, hlm.450), sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip dimana fungsi operasi dan penyimpanan harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, pendapatan, utang dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi berdasarkan otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya, dimana unsur ini merupakan paling penting dalam sistem pengendalian internal. Jika organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan organisasi tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan analisis dengan tanpa melewati prosedur analisis statistik. Moleong (2017, hlm. 6) mengungkapkan, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya konsep, perilaku, persepsi, persoalan tentang manusia, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Upaya membangun pandangan berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti secara rinci atau dengan kata lain, penelitian kualitatif berusaha melihat perspektif dan berdiri secara holistik di atas latar belakang alami dan posisikan manusia sebagai alat penelitian. Dipilihnya metode penelitian kualitatif deskriptif induktif dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif adalah karena penelitian ini tidak didasarkan pada pengujian statistik, melainkan didasarkan pada

alasan bahwa permasalahan yang akan dikaji menekankan pada pandangan dan penalaran dari subjek penelitian atas penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap efektivitas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan interpretif seperti yang dikemukakan menurut Mulyana (2013, hlm. 9), bahwa focus perhatian pendekatan subjektif ialah bagian perilaku manusia yang disebut tindakan, bukan sekedar gerakan tubuh. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu gejala sosial menurut pandangan para pelaku yang diteliti. Penelitian dalam paradigma interpretif dimanfaatkan untuk membantu menginterpretasikan gejala sosial tersebut. Paradigma interpretif diambil dalam penelitian ini sebab penelitian ini mencoba memahami realitas sosial mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap efektivitas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara mendalam

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ialah pendekatan etnometodologi. Etnometodologi adalah studi yang berfokus pada pencaharian makna aktivitas keseharian yang disepakati oleh anggota komunitas Kamayanti (2016, hlm. 134). Peneliti menggunakan pendekatan etnometodologi karena peneliti ingin merefleksikan dan memaknai pengalaman informan dalam melihat dan mempraktikkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara karena masih kurangnya penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban dan pengendalian internal yang masih ada rangkap jabatan di dalam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dalam buku Sugiyono, (2016, hlm.68), terdiri dari tiga komponen yaitu :

- a. Tempat, yaitu dimana interaksi sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- b. Pelaku, yaitu orang-orang yang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini, orang yang terkait ialah Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi, Staff Seksi Verifikasi Akuntansi, Kepala Seksi Umum dan Kepala Pimpinan KPPN
- c. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam situasi yang sedang berlangsung. Aktivitas yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan di KPPN

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti harus memiliki wawasan mengenai bidang atau objek yang akan diteliti, mampu menggali sumber data, serta mampu untuk menganalisis data kualitatif

## **Sumber Data Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2016, hlm.146), mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti berada di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, sumber informan (*human resources*) sebagai sumber primer, yang meliputi informan kunci dan pendukung. Peneliti menetapkan informan kunci dan pendukung untuk mendapatkan data yang berhubungan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal diantaranya:

- a. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak internal KPPN yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Informan kunci terbagi menjadi 2 informan yaitu Kepala Pimpinan KPPN, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepala Bagian Umum KPPN.
- b. Informan pendukung adalah informan yang dibutuhkan untuk mendukung pernyataan informan kunci. Informan pendukung adalah staff verifikasi akuntansi dan umum di KPPN.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan melakukan pengamatan awal dan prapenelitian terkait prosedur atas pengelolaan sistem informasi akuntansi dari tahap pengendalian internal, lalu dilanjutkan dengan tahap wawancara, tahap observasi dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan dokumen untuk sistem informasi akuntansi.

- a. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan bahwa peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras teras kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Proses yang diteliti ialah penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap efektivitas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.
- b. Wawancara yaitu proses tanya jawab antara narasumber dan pencari informasi untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada 3 orang narasumber yaitu kepala pimpinan KPPN, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta Kepala Bagian Umum, karena bagian verifikasi dan akuntansi merupakan bagian yang paling banyak menggunakan sistem informasi akuntansi untuk pemeriksaan

laporan pertanggungjawaban dan bagian umum karena merupakan awal dari sistem informasi akuntansi secara keseluruhan

- c. Dokumentasi merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari dokumen seperti laporan pertanggungjawaban kementerian yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Digunakan sebagai dasar dalam menganalisa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

### **Teknik Validitas Data**

Teknik triangulasi dapat dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang valid. Sugiyono (2016, hlm. 274) mengungkapkan bahwa triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa validitas data. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau informan kemudian membandingkannya, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

### **Teknik Analisis Data**

Kamayanti (2016, hlm. 135) menguraikan 4 (empat) tahap analisis data dengan pendekatan etnometodologi, antara lain:

1. Analisis indeksikalitas. Analisis indeksikalitas menekankan pada pembentukan tema atau indeks melalui bahasa tubuh maupun ucapan-ucapan.
2. Analisis reflektivitas. Etnometodologi akan mengungkap bagaimana seseorang mendiskusikan tindakan mereka dan secara terus-menerus melakukan pembelajaran tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka.
3. Analisis aksi kontekstual. Aksi dalam etnometodologi fokus terhadap aksi organisasional yang dikarenakan adanya interaksi antar organisasi atau kelompok tertentu.
4. Penyajian *common sense knowledge of social structures*. Akhir dari penelitian etnometodologi adalah mendapatkan suatu pemahaman mengenai struktur sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem informasi akuntansi di KPPN sudah berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat dimana sistem informasi akuntansi telah menggunakan sistem komputerisasi yang membantu staff dalam menyelesaikan tugas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kementerian/ lembaga pemerintah serta membantu mendeteksi pengumpulan laporan pertanggungjawaban kementerian dengan tujuan agar KPPN dapat mengetahui kementerian yang terlambat dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban sehingga

KPPN dapat memberikan sanksi keterlambatan kepada kementerian yang terlambat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban, walaupun masih ada yang harus diperbaiki seperti sistem yang kadang mengalami gangguan sehingga berkas harus dibawa ke KPPN serta adanya keterlambatan dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban walaupun sudah mulai berkurang dalam keterlambatan tersebut karena sudah adanya sistem pemeriksaan laporan pertanggungjawaban menggunakan aplikasi *e-rekon, sprint* sehingga membuat pemeriksaan lebih cepat, tetapi untuk menghubungi kesalahan pada laporan pertanggungjawaban masih menggunakan aplikasi *whatsapp*, tidak melalui sistem karena belum adanya sistem chatting tersebut dan adanya sistem informasi secara terkomputerisasi membuat sistem menjadi lebih efisien. Aplikasi dengan menggunakan *e-rekon* dan *sprint* membantu kinerja KPPN dalam meningkatkan pelayanan kepada kementerian, terutama dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Adanya sistem dengan menggunakan komputerisasi membuat sistem menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas kegiatan, terutama dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, walaupun masih sering terjadi keterlambatan dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.

Pembuatan SPM dan SP2D yang ada di KPPN menggunakan sistem aplikasi SPAN yang bertujuan untuk memasukkan SPM sehingga bisa dicairkan untuk kegiatan kementerian dalam menjalankan tugasnya. Pembuatan SPM dapat dilakukan apabila kementerian sudah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kementeriannya. Apabila kementerian tersebut tidak mengirimkan laporan pertanggungjawabannya sebelum tanggal 10 bulan berjalan, maka kementerian tersebut akan terkena sanksi yaitu tidak dapat membuat SPM LS(langsung), SPM UP(Uang Persediaan) dan SPM GU(Ganti Uang), tetapi kementerian harus tetap mengumpulkan laporan pertanggungjawaban walaupun terkena sanksi. Pendaftaran SPM dan SP2D dalam KPPN sudah berjalan efisien, dimana pendaftaran dilakukan secara cepat, walaupun masih ada kelemahan dimana banyaknya SPM yang menumpuk di dalam KPPN serta keterlambatan dalam proses pendaftaran SPM, dimana keterlambatan itu bisa terjadi karena kesalahan pada kementerian atau karena sistemnya yang kadang mengalami gangguan dan pembuatan SPM dan SP2D yang membuat berkas menjadi menumpuk di dalam KPPN membuat pegawai menjadi sering lupa apakah SPM untuk kementerian tersebut sudah ada atau belum dan membuat pegawai sering memasukkan ke dalam sistem menjadi *double* untuk menghindari kemungkinan belum diinput. Pembuatan SPM dan SP2D yang *double* membuat SPM menjadi banyak dan membuat banyaknya berkas yang tersedia di dalam KPPN. Penginputan SPM dan SP2D dalam KPPN masih sering terjadi kesalahan dalam penginputan, sehingga membuat analisa hasil rekonsiliasi menjadi tidak benar. Penginputan SPM dan SP2D yang belum direkam dapat membuat pemeriksaan laporan pertanggungjawaban menjadi berbeda dan menyebabkan semua rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban menjadi salah sehingga kesalahan dalam penginputan SPM dan SP2D membuat selisih dalam laporan pertanggungjawaban menjadi sangat tinggi,

sehingga harus memperbaiki perekaman pada SP2D agar kembali normal. Penggunaan aplikasi SPAN oleh seksi pencairan dana membantu staff KPPN dalam membuat dan memeriksa SPM serta kontrak, sehingga dapat diketahui apabila terjadi kesalahan atau kejanggalan dalam menginput SPM serta kontrak, maka SPM dan kontrak tersebut tidak dapat diterima atau ditolak dan membuat kementerian tersebut harus melakukan pengajuan ulang SPM atau kontrak mulai dari awal.

Pengendalian Internal di dalam KPPN sudah mulai berjalan efektif, dimana staff dalam KPPN sudah mampu menguasai sistem informasi akuntansi yang menggunakan komputerisasi sehingga pekerjaan dilakukan secara cepat dan bisa menggunakan teknologi yang ada, walaupun masih ada yang harus diperbaiki seperti karyawan KPPN dalam menjalankan tugasnya, masih ada rangkap jabatan di dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan karena masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam KPPN sehingga tidak dapat dihindarkan adanya rangkap jabatan dan pengerjaan tugas yang seharusnya bukan bagian dari seksi tersebut. Selain itu pembagian tugas yang dilakukan oleh KPPN masih belum merata. Hal ini dapat terlihat dimana dalam bagian SPM, terdapat 3 orang yang hanya bertugas melakukan *approve* terhadap SPM, sementara untuk mengurus surat keterangan penghentian pegawai (SKPP) hanya dilakukan oleh 1 orang yang membuat SKPP menjadi lama, sementara SPM tetap menjadi lama walaupun sudah dikerjakan 3 orang. Pembagian tugas yang belum seimbang membuat sebagian tugas ada yang selesai dengan tepat waktu, tetapi ada yang selesai dengan lama sehingga membuat pembagian tugas belum tepat waktu. Adanya pembagian tugas yang seimbang diharapkan dapat membuat tugas masing-masing dapat selesai dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Pembagian tugas yang seimbang diharapkan dapat membuat semua kegiatan yang ada di KPPN berjalan dengan baik sehingga membuat tingkat pelayanan di KPPN menjadi lebih baik dan lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Pembagian tugas yang adil dan seimbang sangat diperlukan dalam KPPN mengingat banyaknya tugas yang mereka kerjakan karena berkaitan dengan penganggaran yang dibutuhkan oleh kementerian dalam menjalankan program kementerian tersebut.

Rangkap jabatan di KPPN sendiri masih terjadi walaupun sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Hal ini terlihat dengan adanya seksi-seksi untuk menjalankan tugas masing-masing seperti seksi bagian umum, seksi pencairan dana dan seksi verifikasi dan akuntansi. Struktur organisasi di dalam KPPN sudah ada walaupun masih terdapat dalam struktur organisasi yang memiliki dua jabatan sekaligus karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di KPPN. Praktik kegiatan yang ada di KPPN masih belum berjalan dengan baik, karena adanya rangkap jabatan di KPPN. Pembagian tugas yang belum merata membuat kegiatan di KPPN kurang berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari pengiriman transaksi oleh kementerian kadang bukan merupakan bagian bendahara kementerian tersebut, sementara untuk KPPN, penerimaan surat masuk kadang dilayani oleh bagian lain yang sedang tidak ada tugas dan tidak adanya perputaran jabatan secara berkala di KPPN karena kurangnya sumber daya manusia

untuk mengecek tentang efektivitas sehingga membuat efektivitas di KPPN belum berjalan maksimal walaupun di KPPN sudah mulai dengan adanya pengambilan nomor urut bagi kementerian untuk membuat SPM serta adanya pencocokan secara fisik yang masih sering ada di KPPN.

Adanya bantuan dari staff lain membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan adanya bantuan dari staff seksi lain membuat tugas mereka bisa diselesaikan dengan cepat dan pelayanan pun menjadi baik. Rangkap jabatan yang ada di dalam KPPN membantu staff lain yang mungkin mempunyai tugas banyak menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam KPPN sehingga secara otomatis staff dan karyawan lain ikut membantu dan mengerjakan tugas dari staff lain. Rangkap jabatan yang ada di dalam KPPN tidak selamanya berjalan dengan baik, walaupun mereka sangat merasa adanya rangkap jabatan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah, terutama mereka yang mempunyai tugas yang sedang menumpuk dan banyak, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dan memudahkan dalam pelayanan kepada kementerian atau lembaga pemerintah.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yang berjudul penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap efektivitas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan di KPPN Jakarta VII untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal di KPPN, apakah dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dan pengendalian internal membuat pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kementerian/ lembaga pemerintah sudah berjalan dengan efektif atau belum. Pembahasan ini telaah dilakukan dengan menggunakan kajian analisis yang sesuai dengan menggunakan pendekatan etnometodologi dan paradigma interpretif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang penerapan sistem informasi akuntansi di KPPN yaitu

1. Penerapan sistem informasi akuntansi di KPPN mulai berjalan dengan baik, tetapi masih ada yang harus diperbaiki seperti menumpuknya SPM di KPPN sehingga membuat terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana anggaran yang digunakan kementerian untuk menjalankan tugas dan kegiatannya.
2. Penggunaan aplikasi *sprint* dalam kegiatan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban berjalan dengan efektif, walaupun masih sering terjadi keterlambatan dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kementerian/ lembaga pemerintahan.
3. Prosedur penerapan sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik dan menggunakan sistem komputerisasi yang membantu karyawan dan staff dalam menyelesaikan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, SPM dan SP2D, walaupun masih terdapat karyawan menggunakan sistem yang manual untuk menyelesaikan pekerjaannya

4. Struktur organisasi di KPPN berjalan dengan baik. Dalam KPPN memiliki struktur organisasi jelas dan memiliki bagian-bagian dalam menyelesaikan tugasnya, walaupun masih ada rangkap jabatan dan pembagian tugas yang belum sesuai sehingga membuat efisiensi di KPPN belum maksimal.
5. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan di KPPN mulai berjalan dengan baik, tetapi masih harus diperbaiki seperti pembagian tugas belum merata sehingga menyebabkan laporan menjadi sedikit terlambat dalam penyampaiannya.
6. Unsur praktik yang sehat di KPPN berjalan dengan baik dan pegawai di KPPN sudah menjalankan tugasnya, walaupun mereka harus membantu karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang
7. Secara umum, permasalahan yang ada di dalam KPPN yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi yang masih membuat keterlambatan dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan berkas yang masih menumpuk serta adanya rangkap jabatan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di KPPN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Arens, Randal, E., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and Assurance Services : An integrated Approach. In *Fourteenth Edition*.
- A., K. (2015). The Practice and Prospects of Accounting Information Systems (AIS). *International Journal of Applied Information Systems*, 10(3), 16–22. <https://doi.org/10.5120/ijais2015451475>
- Ambarwati, F. W., & Isharijadi, I. (2012). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pada Pt. Dwi Mulyo Lestari Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.520>
- Azizah, S. N. (2017). Analysis of Factors Affecting the Implementation of Computer-Based Accounting Information System on Small and Medium Enterprises. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(2), 111–115. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4021>
- Ariadharma, A. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penjualan Terhadap Efektivitas Penjualan: Studi Kasus PT. INTI (Persero) Bandung*. JRAK, Volume 11, No 1 Februari 2015
- Ardana, I. C., & Lukman, H. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badara, M., & Saidin, S. (2013). Impact of the effective internal control system on the internal audit effectiveness at local government level. *Journal of Social and Development Sciences*. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20130202.05>



- Bastian, (2006). *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Efendi, D., Supheni, I., & Astutik, R. W. (2013). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Kinerja Karyawan Terhadap Keefektifan Pengendalian Internal Di Koperindo Jatim Cabang Nganjuk. *Cahaya Aktiva*, 03(2), 72–81.
- Fakeeh, K. A. (2015). *The Practice and Prospects of Accounting Information Systems ( AIS )*. (December). <https://doi.org/10.5120/ijais2015451475>
- Huda, P. A., Ekawati, R. K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Palembang). *Jurnal STMIE Multi Data Palembang*, (x), 1–14.
- Information, A., International, S., & Science, I. (n.d.). *49 Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems International Journal of Information Science and Technology*. 6(2), 49–59.
- Issn, A. (2012). *The Role of Internal Auditors in Ensuring Effective Financial Control at Local Government Level : The Case of Alkaleri L . G . A . , Bauchi State*. 3(4), 57–66.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Maulana, R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Pada Pt. Arta Boga Cemerlang Cabang Majalengka. *Universitas Majalengka*, 2(1).
- Musmini, L. S. (April, 2013). Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usah Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja). *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62-80
- Nahar, A., & Widiastuti, A. (2011). Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Industri Menengah Di Kabupaten Jepara. *Prosiding Semantik*, 1(1), 42-46.
- Onaolapo, A. A., & Odetayo, T. A. (2013). Effect of Accounting Information System on Organisational Effectiveness: A Case Study of Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria. *American Journal of Business and Management*, 2(1), 183. <https://doi.org/10.11634/216796061706210>
- Pasaribu, M. T. (2013). Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Penilaian Kinerja Pusat Biaya Pada Pt. a.J Central Asia Raya Cabang Manado Tahun 2010. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1627–1637.

- Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektifitas Pelaporan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Manado. (2014). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Poputra, A., & Salim, F. (2015). Analisis Penerapan Sitem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Bukopin Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1034–1043.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Region's Financial Accounting Information System and the Quality of Local Government Financial Reports. (2016). *Information Management and Business Review*.
- Sajady, H., Dastgir, M., & Hashem Nejad, H. (2008). Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. *International Journal of Information Science and Management*.
- Sajady, H. dkk. (2008). Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. *International Journal of Information Science and Management*.
- Susanto, A. (2016a). The effect of internal control on accounting information system. *International Business Management*. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.5523.5529>
- Susanto, A. (2016b). The influence of accounting information system quality to accounting information quality and its implications to the good study program governance. *International Business Management*, 10(24), 5767–5776. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.5767.5776>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Retrieved 13 Mei, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id>
- Wood, A., and Brathwaite, N. (2013). *Internal Controls in The Retail Sector: A Case Study Of A Leading Supermarket in Barbados*. *International Journal of Arts and Commerce*, December, 2013, Vol. 2 No. 11
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusup, M. (2011). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap*

*Profitabilitas Terhadap PT. Kemilaumas Karya Abadi Bandung. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* Vol. 5, No. 1, April 2011

Zeina, N., Sari, M., Prof, M. M., & Purwanegara, H. M. D. (2016). *The Effect of Quality Accounting Information System in Indonesian Government ( BUMD at Bandung Area )*. 7(2), 301–302.

Zarkasyi, W., & Hertati, L. (December, 2015). Effect Of Competence User Information System, The Quality Of Accounting Information System Management And Implications Insatisfaction User Information System (State Owner In Sumatera Selatan). *European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research*, 3(2)